

Candra, D., Suwondo, S.H. Siregar
2020 : 14(2)

**STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT EKS HGU BERBASIS
MASYARAKAT DI KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK**

Dudi Candra

*Pekerja Sosial / Aktifis Lingkungan Perkumpulan Elang Jl. Serasi No.08
Kel. Delima, Kec. Tampan Pekanbaru, email: dudicandra75@gmail.com*

Suwondo

*Koordinator Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Jl. HR Subantas KM 12,5 Kampus
Binawidya Universitas Riau Pekanbaru. email: wondo_su@yahoo.co.id*

Sofyan Husein Siregar

*Dosen Program Studi Magsiter Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Riau,
Pekanbaru, Jl. Pattimura No.09 Gedung I Gobah Pekanbaru, Telp. 0761-23742.
email: sofyansiregar@yahoo.com*

***Strategy Of Community-Based Peatlands management In
Ex-Concession Area, Pusako, Siak Regency***

ABSTRACT

Central government authority which governing mastery, ownership, use and utilization of land and natural resources sectorally, authoritarian, and centralized in granting licenses for utilization of natural resources to business entities resulting in 3 (three) main problems, that are land tenure inequality, agrarian conflicts in natural resource management, and environmental damage. In 2018 in Riau Province, precisely in Siak Regency, Government implements land redistribution ex-concession (HGU) of PT. Mahakarya Eka Guna (MEG) for community through the land objected of agrarian reform program (TORA) in order to rearrange the imbalance of mastery structure, ownership, use and utilization of land toward which more fair. So that land can be a source of livelihood and welfare for the community. TORA Program location is majority are in the function area of the peat swamp ecosystem Ministry of Environment and Forestry (KLHK) with peat depths of more than 3 meters, so the management of peatlands must follow government regulations related to regional function. The condition is currently being carried out land clearing on the ex-concession land in TORA program to immediately utilization land, while the public does not have enough information and knowledge about the most profitable choice of plants.

Keyword: *Strategy, Peatlands Management, Community-Based*

PENDAHULUAN

Ekosistem rawa gambut merupakan salah satu ekosistem penting yang berperan dalam pembangunan di sektor kehutanan. Kerusakan Ekosistem rawa gambut yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembukaan gambut, pembangunan kanal, perubahan tutupan lahan dan kebakaran, mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Untuk memulihkan Ekosistem rawa gambut yang rusak, diperlukan sistem dan teknik yang sesuai dengan memperhatikan aspek ekologi, produksi dan sosial ekonomi. Pengendalian kerusakan Ekosistem rawa gambut, yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan, telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016. Oleh karena itu tindakan restorasi (termasuk penggenangan kembali) dan rehabilitasi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan lahan gambut ke depan untuk mengembalikan kondisi biofisik guna memulihkan peran dan fungsi Ekosistem rawa gambut.

Kewenangan pemerintah pusat yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dan kekayaan alam secara sektoral, otoritarian, dan sentralistik dalam pemberian izin-izin pemanfaatan kekayaan alam kepada badan-badan usaha mengakibatkan 3 (tiga) masalah utama yakni ketimpangan penguasaan lahan, konflik-konflik agraria dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan. Untuk itu, pada Tahun 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Reforma Agraria, pada pasal 2 Bab 2 menyebutkan bahwa Reforma Agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan; menangani sengketa dan konflik agraria; menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 86, pada Tahun 2018 di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Siak, Pemerintah melaksanakan Redistribusi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Mahakarya Eka Guna (MEG) untuk masyarakat melalui program TORA dalam rangka menata ulang ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ke arah yang lebih berkeadilan. Sehingga tanah dapat menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Lahan yang dibagikan pada masyarakat untuk pertanian tersebut berasal dari pelepasan seluruh sertifikat HGU PT MEG yang terdiri dari Blok 7 dan Blok 9.

Secara keseluruhan, luas tanah program TORA sekitar 10.000 ha untuk 10.000 penerima dengan luas masing-masing bidang 0,8 ha. Tidak dikeluarkannya izin usaha perkebunan untuk perusahaan tersebut, karena adanya Inpres moratorium gambut (INPRES RI No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut) dan Inpres moratorium sawit (INPRES No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit), dimana lokasi yang dimohonkan tersebut sebagian besar berada pada kawasan fungsi Ekosistem rawa gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan kedalaman lebih dari 3 meter, sehingga pengelolaan lahan gambut tersebut harus mengikuti regulasi pemerintah terkait fungsi kawasan.

Lahan program TORA didominasi oleh gambut sangat dalam. Kondisinya saat ini sedang dilakukan *land clearing* untuk segera dilakukan pemanfaatan lahan. Sementara itu masyarakat belum mempunyai

cukup informasi dan pengetahuan tentang pengolahan lahan dan tanaman pilihan yang paling menguntungkan di lahan gambut. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan kajian sosial masyarakat secara ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan lahan gambut eks HGU Korporasi tersebut untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi kawasan Ekosistem rawa gambut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kondisi dan potensi ekologi lahan gambut eks HGU Korporasi, menganalisis sosial ekonomi masyarakat pada lahan gambut eks HGU korporasi, dan menyusun strategi pengelolaan lahan gambut eks HGU sebagai TORA untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Lahan eks HGU yang menjadi program TORA seluas 10.033,48 hektar merupakan lahan eks HGU PT. MEG yang terletak di tiga Kecamatan Kabupaten Siak. HGU PT. MEG terdiri dari dua lokasi. Lokasi pertama yakni Eks HGU-7 berada pada Kecamatan Sungai Apit yang terdiri dari empat Kampung yaitu Kampung Mengkapan, Kampung Bunsur, Kampung Lalang dan Kampung Teluk Masjid. Sedangkan Eks HGU-9 terletak di Kecamatan Mempura (Kampung Koto Ringin) dan Kecamatan Pusako (Kampung Berbari, Kampung Sungai Limau, Kampung Pusako, dan Kampung Pebadaran). Namun fokus penelitian ini dilakukan di Eks HGU-9 yang berada di Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau Kecamatan Pusako.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif, peneliti berusaha untuk menggali informasi, menggambarkan, melukiskan atau mengetahui bagaimana kondisi dan potensi ekologi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pada lahan gambut eks HGU korporasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan wawancara untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder dari literatur dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Jumlah sampel yang diwawancarai sebanyak 15 orang yang terdiri dari Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pemerhati lingkungan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif (Sugiyono, 2017).

Parameter-parameter yang diambil di lapangan adalah untuk kesesuaian tanaman dipadukan dengan hasil identifikasi sifat gambut, yakni tingkat kematangan gambut yang ditentukan dengan metode perasan, drainase tanah, kedalaman air tanah yang diukur dengan menggunakan meteran dari permukaan tanah sampai ke batas muka air tanah, dan kemasaman tanah yang diukur menggunakan alat ukur pH meter.

Sebelum menentukan strategi pengelolaan, penulis melakukan analisis kesesuaian lahan dengan cara mencocokkan syarat tumbuh tanaman dengan kondisi fisik, kimia, bio lahan gambut. Kemudian dilakukan analisis nilai ekonomi dan prospek pengembangan komoditas untuk menentukan tanaman yang akan menjadi pilihan dalam pengelolaan gambut berkelanjutan, sehingga selain untuk kelestarian lingkungan, hasil dari tanaman tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu dilakukan analisis pengelolaan lahan berbasis masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT (*Strength – Weakness – Opportunity – Threat*) untuk menyusun arahan strategi pengelolaan lahan gambut berdasarkan data hasil analisis kesesuaian lahan, analisis ekonomi dan prospek pengembangan komoditas, dan analisis pengelolaan lahan berbasis masyarakat, serta data hasil wawancara yang dikelompokkan ke dalam kelas *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities*, dan *Threats*. Hasil akhir dari Analisis SWOT adalah prioritas arahan strategi pengelolaan lahan gambut eks HGU berbasis masyarakat di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak lama masyarakat secara turun temurun telah mengelola dan memanfaatkan tanah gambut sebagai lahan untuk perkebunan dan pertanian dalam skala yang relatif kecil dan berpindah-pindah. Seiring perkembangan zaman masyarakat mulai mengembangkan komoditi-komoditi tertentu sebagai tanaman unggulan di lahan gambut. Masyarakat Kampung Sungai Limau dan Kampung Sungai Berbari dari dahulunya memanfaatkan lahan mereka dengan menanam karet. Namun sejak berkembangnya komoditi kelapa sawit yang saat itu dianggap masyarakat memiliki nilai ekonomi tinggi, kebun karet masyarakat ini kemudian beralih menjadi kebun kelapa sawit. Selain itu masyarakat memanfaatkan lahan mereka dengan tanaman kebun campuran. Kebun ini biasanya ditanam dengan tanaman kelapa sawit, karet, kelapa, pinang, dan aneka buah-buahan seperti nanas, nangka, rambutan, dan durian, selebihnya merupakan area hunian, fasilitas umum serta area campuran hutan sekunder yang berada di wilayah gambut ataupun tanah mineral tanpa perlakuan khusus.

Masyarakat kampung yang tinggal di sekitar lahan eks HGU-9 hampir sebagian besar tinggal dan hidup di tanah gambut. 90% masyarakat yang tinggal di tanah gambut merupakan masyarakat dengan Suku Melayu dan sekitar 10% lainnya termasuk masyarakat migran seperti Suku Jawa, Minang, Batak, dan Bugis yang pada awalnya datang sebagai pekerja perusahaan perkebunan di dalam atau di luar kampung. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat ini tertuang pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau

No.	Komponen	Hasil	Keterangan
1.	Kepemilikan Lahan	3 – 5 ha/KK	
2.	Penggunaan lahan	a. 60% Kebun Kelapa sawit b. 40% Kebun campuran dan tempat tinggal	
3.	Pekerjaan Sektor formal	5%	PNS Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis
4.	Pekerjaan Sektor non formal	95%	Buruh Bangunan, Buruh Tani, Petani kebun, dan Petani intensif
5.	Penduduk Asli	90%	Suku Melayu
	Penduduk Pendatang	10%	Suku Jawa, Minang, Batak, dan Bugis

Untuk mengetahui kondisi tanah gambut, kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah gambut, perlu dilakukan pengukuran tingkat kematangan dan kedalaman gambut, drainase tanah, kedalaman air tanah, dan kemasaman tanah. Dalam hal ini penulis melakukan pengukuran pada titik-titik koordinat lokasi yang sudah dilakukan pengukuran kedalaman gambut oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia, pengeboran setiap titik ini dilakukan hingga kedalaman mencapai tanah mineral. Kondisi tanah gambut di lokasi penelitian disusun pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Kondisi Tanah Gambut di Lahan eks HGU-9 Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau

No	Nama Titik	Titik Koordinat	Kedalaman Gambut (m)	TMA (m)	Jenis Gambut	pH
1.	P1	0.87727, 102.08942	3,25	0,44	Saprik	3,8
2.	P2	0.88022, 102.09726	3,7	0,28	Saprik	4
3.	P3	0.87497, 102.10079	4,63	0,6	Saprik	3,4
4.	P4	0.86573, 102.10986	8,7	1,51	Saprik	3,5
5.	P5	0.87727, 102.11043	6,9	1,13	Saprik	3,4
6.	P6	0.88289, 102.11226	7,23	0,84	Saprik	3,4
7.	P7	0.88923, 102.10699	6,22	0,60	Saprik	3,6
8.	P8	0.89529, 102.10344	3,08	0,35	Saprik	3,9
9.	P9	0.88792, 102.09560	1,94	0,2	Saprik	4,3

Kedalaman gambut di lokasi studi sangat penting untuk diketahui karena akan menentukan arah dan kebijakan pengelolaan dan pemilihan jenis komoditi yang sesuai. Kedalam gambut pada areal Program TORA eks HGU-9 didominasi oleh gambut sangat dalam dengan rata-rata kedalaman 1 hingga 8 meter. Kecenderungan kedalaman muka air tanah pada lahan eks HGU-9 menunjukkan bahwa semakin ke timur semakin dalam dan semakin ke Barat semakin dangkal. Hal ini kemungkinan berkorelasi dengan kondisi topografi yang semakin tinggi elevasinya pada areal bagian Timur. Kedalaman muka air tanah bervariasi antara 0,2 hingga 1,50 meter (pengukuran dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2019, yaitu pada saat memasuki musim penghujan).

Ekosistem rawa gambut merupakan salah satu ekosistem penting yang berperan dalam pembangunan di sektor kehutanan. Kerusakan Ekosistem rawa gambut yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pembukaan gambut, pembangunan kanal, perubahan tutupan lahan dan kebakaran, mengancam kelestarian hutan dan lingkungan hidup. Miettinen *et al.* (2016) mengatakan bahwa antara Tahun 1990 sampai Tahun 2015, 50% dari 15,7 juta hektar lahan hutan rawa gambut di Semenanjung Malaysia dan di Pulau Kalimantan dan Sumatera dikonversi menjadi lahan yang dikelola. 22,4% oleh petani kecil dan 27,4% oleh perkebunan industri. Pada Tahun 2015, sekitar 20% (3,2 juta hektar) lahan gambut di daerah tergolong terbuka dan pertumbuhan sekunder sementara hanya 6% hutan tidak menunjukkan bukti pengaruh manusia.

Kondisi topografi di lahan gambut eks HGU-9 di Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau adalah datar. Kondisi ini menyebabkan kecepatan aliran air pada kanal-kanal yang ada di lahan tersebut sangat rendah sekali atau seperti tidak mengalir. Hal ini dapat menyebabkan banjir jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, dan terjadi genangan yang relatif cukup lama. Kondisi ini perlu mendapat perhatian jika pada areal tertentu akan dijadikan untuk areal budi daya pertanian. Sebaliknya, pada musim kemarau debit air masih cukup terjaga dan tidak kering, walau tetap mengalami penyusutan elevasi atau kuantitas.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lahan gambut khususnya CO₂ di antaranya berasal dari pembakaran cadangan karbon atas permukaan tanah yang berupa pohon dan serasah tanaman. Emisi juga terjadi karena pembakaran atau terbakarnya lahan gambut dan proses dekomposisi sebagai akibat perubahan kondisi anaerob (tergenang-basah) menjadi aerob (kering). Penelitian Hooijer *et al.* (2010) menunjukkan bahwa emisi CO₂ lahan gambut berkisar antara 16,2–776,7 mg CO₂/m²/jam tergantung pada kedalaman permukaan air tanah. Emisi paling kecil terjadi pada permukaan air tanah tertinggi (dangkal) dan emisi meningkat bila permukaan air tanah semakin

dalam. Menurut Hooijer *et al.* (2006), kedalaman saluran drainase sangat mempengaruhi tingkat emisi CO₂ pada lahan gambut. Pada kedalaman drainase 30-120 cm, emisi CO₂ meningkat 9,10 t/ha/tahun setiap penambahan kedalaman drainase 10 cm.

Persepsi Masyarakat Terhadap Program TORA

Pelaksanaan program TORA dimulai dengan terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau nomor 52/KEP-14.15/IV/2018 Tanggal 2 April 2018 tentang penegasan tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah objek reforma agraria atas tanah yang terletak di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak, Pemerintah melaksanakan Redistribusi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Mahakarya Eka Guna (MEG) untuk masyarakat melalui Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka menata ulang ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ke arah yang lebih berkeadilan. Sehingga tanah dapat menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Proses pembagian sertifikat dilakukan dengan cara diundi oleh pemerintah kabupaten bersama masing-masing perwakilan dari setiap desa. Proses pengundian yang dilakukan ini membuat masyarakat mendapatkan lahan TORA secara acak dan tidak berada pada desa mereka masing-masing. Sebagai contohnya masyarakat Desa A mendapat lokasi lahan TORA di Desa B. Acaknya lokasi persil dari masyarakat menyebabkan sulitnya untuk mengelola lahan TORA secara individu.

Terkait hal tersebut maka, Asisten 1 Bupati Siak, Drs. Budhi Yuwono, M.Si saat diwawancara di Kantor Bupati Siak (Januari 2020) mengatakan bahwa Sertifikat TORA ini memang dibagikan untuk masyarakat, hanya saja Pemerintah Kabupaten merencanakan pengelolaannya secara bersama, karena tidak semua penerima lahan TORA adalah petani. Pemkab khawatir sertifikat TORA yang dibagikan itu akan diperjualbelikan oleh masyarakat. Selain itu, lahan eks HGU merupakan lahan gambut. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemkab mencoba untuk membuat suatu sistem atau mekanisme tata kelola bersama dalam pengelolaan lahan program TORA.

Berdasarkan wawancara di tingkat masyarakat, pada umumnya masyarakat sangat menyambut baik program TORA oleh pemerintah. Masyarakat sangat berharap lahan tersebut dapat dikelola oleh masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Masyarakat juga menyadari bahwa lahan eks HGU-9 merupakan lahan yang terdiri dari gambut dengan tipologi lahan yang berbeda sehingga berharap pengelolaannya dapat dilakukan secara bersama dan dibantu oleh pemerintah.

Analisis Kesesuaian Lahan, Nilai Ekonomi, dan Prospek Pengembangan Komoditas

Lahan gambut termasuk dalam kelompok lahan marginal (sub optimal), yaitu lahan yang memiliki banyak faktor pembatas budidaya terutama jika lahan tersebut digunakan untuk budidaya jenis-jenis komoditi bukan asli gambut. Kesuburan tanah yang rendah, pH rendah (masam – sangat masam), dan drainase buruk adalah faktor pembatas budidaya yang utama pada lahan gambut. Oleh karena itu untuk meningkatkan keberhasilan budidaya pada lahan gambut dengan input produksi yang relatif rendah maka alur pemilihan jenis komoditi dapat dijadikan pedoman dalam penetapan jenis komoditi yang akan dikembangkan di lahan gambut.

Sebelum proses redistribusi lahan dilakukan, Pemerintah Kabupaten Siak telah menyampaikan bahwa tanaman sawit dan tanaman hutan industri lainnya tidak boleh ditanam pada lahan gambut program TORA. Tanaman yang bisa dikembangkan adalah tanaman yang ramah

gambut. Menurut Najiyati *et al.* 2005, pemanfaatan lahan gambut harus disesuaikan dengan tipologinya misalnya (a) lahan potensial, bergambut, aluvial bersulfida dalam, gambut dangkal (≤ 75 cm) dapat ditata menjadi lahan sawah atau untuk sistem usaha tani padi sawah, (b) gambut dengan kedalaman 75 – 150 cm dapat dimanfaatkan untuk usaha tani hortikultura semusim, padi gogo, palawija, dan tanaman tahunan, (c) gambut dengan kedalaman 150 – 250 cm dapat ditata untuk usaha tani tanaman perkebunan, seperti karet, kelapa, dan kelapa sawit, (d) gambut dengan kedalaman lebih dari 250 cm dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman kehutanan, seperti Sengon, Sungkai, Jelutung, Meranti, Pulai, dan Ramin.

Setelah melakukan penelitian lapangan untuk analisis kesesuaian lahan, dengan pertimbangan aspek sosial masyarakat, pengetahuan masyarakat, kearifan lokal, dan tanaman yang ada dan telah dibudidayakan oleh masyarakat, serta menjadi keinginan masyarakat dalam pengelolaan lahan TORA, beberapa jenis tanaman yang potensial dikembangkan di lahan Program TORA Kabupaten Siak yakni (1) Tanaman Pertanian (Padi, Jagung, Nanas, dan Ubi kayu), (2) Tanaman Perkebunan (Kelapa, Pinang, Sagu, Kopi Liberika, dan Aren), dan (3) Tanaman Kayu-kayuan (Mahang).

Terkait dengan bahwa kayu Mahang merupakan tanaman hutan, maka dalam hal panen, menurut PERMENLHK Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak menyebutkan bahwa Pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan. Sementara itu, dalam hal pengangkutan hasil panen kayu Mahang, petani Mahang harus melengkapi dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat 2 PERMENLHK Nomor 21 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Dari hasil investigasi yang pernah dilakukan penulis bersama Rivanda dari Wetlands International Indonesia (WII) pada Tahun 2019, Mahang banyak tumbuh di lahan gambut masyarakat. Menurut masyarakat, lahan gambut bekas terbakar akan tumbuh Mahang dengan sendirinya tanpa ditanam. Kayu Mahang memiliki peluang pasar yang sangat baik. Kebutuhan kayu Mahang pada sektor industri kayu lapis sangat tinggi. PT. Panca Eka Bina Plywood Industri (PEBPI) yang memiliki industri kayu lapis di Kabupaten Siak membeli kayu Mahang dengan diameter minimal 20 cm seharga Rp.660.000/m³. Selain itu kayu Mahang juga dibutuhkan oleh Pengusaha kotak kayu sebagai supplier kotak kayu bagi industri pulp and paper PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Selain untuk industri kertas, maraknya penjualan dengan sistem online juga menyebabkan tingginya permintaan kotak kayu pada usaha pembuat kotak kayu. Penjual online menggunakan kotak kayu tersebut untuk pengemasan pengiriman barang. Rata-rata pengusaha pembuat kotak kayu membeli kayu mahang Rp.500.000 – Rp.600.000 per m³. Selain untuk kebutuhan industri, kayu Mahang juga sering digunakan masyarakat untuk membangun sekat kanal dalam usaha pembasahan lahan gambut.

Analisis Pengelolaan Lahan Berbasis Masyarakat

Beberapa dekade belakangan ini, kebakaran lahan gambut terus terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ahli fungsi lahan serta pembuatan drainase yang massif yang mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan gambut. Selain menyebabkan

dampak secara lingkungan, kebakaran lahan gambut juga berdampak besar baik dalam aspek ekonomi maupun aspek sosial masyarakat.

Hampir sebagian besar masyarakat kampung yang mendapatkan lahan dalam program TORA ingin memanfaatkan dan mengelola lahan TORA menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Masyarakat berharap dapat menanam tanaman yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara cepat seperti tanaman Nanas, Padi, Jagung dan tanaman hortikultura lainnya. Rata-rata alasan masyarakat memilih tanaman tersebut dikarenakan sudah melihat prospek yang cukup bagus pada kampung-kampung lain.

Kelembagaan masyarakat dalam mengelola lahan TORA di lahan eks HGU PT. MEG perlu dibentuk untuk memberikan pelayanan usaha antar kampung untuk bekerjasama dalam pengelolaan lahan. Beberapa kelembagaan masyarakat yang dapat dijadikan lembaga pengelola lahan Program TORA adalah Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), BUMKam Bersama, Koperasi, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

BUMKam dapat menjadi induk kegiatan kelembagaan ekonomi di Kampung. Konsep ideal dalam pembangunan kelembagaan ekonomi kampung, semua sumber daya ekonomi kampung dikemas dan dikelola melalui BUMKam. Menurut Penghulu Kampung Sungai Berbari, Ibnu Sinar lebih memilih BUMKam sebagai lembaga pengelola lahan TORA. Hal ini disampaikan saat diwawancarai di ruang kerjanya (Februari, 2020). Pengembangan BUMKam sejalan dengan keinginan Pemerintah Pusat. Pilihan ini menurutnya dikarenakan BUMKam memiliki AD/ART, dan ada persentase pembagian hasil dari pengelolaan itu untuk pengembangan komoditi masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat. Jika lembaga lain yang mengelola dan tidak ada keterlibatan desa, tidak ada *income* untuk desa. Sementara banyak kegiatan-kegiatan di desa yang dianggarkan seperti kegiatan keagamaan, budaya, keramaian, dan lain-lain yang memerlukan biaya. Dengan adanya pendapatan desa, mudah-mudahan desa akan menjadi desa yang mandiri.

BUMKam Bersama adalah Badan Usaha yang dibentuk antar kampung untuk mengelola usaha dengan tujuan membangun partisipasi, keterlibatan, rasa memiliki sumber daya kampung, dan tanggung jawab menuju kemandirian kampung. Sebagaimana layaknya sebuah Badan Usaha Milik kampung, dimana di dalam struktur kelembagaan BUMKam Bersama akan ada unit usaha yang dapat berbentuk badan hukum tertentu atau unit Pengelola yang memiliki independensi otoritas mengelola lahan TORA sepanjang dapat dipertanggungjawabkan ke BUMKam Bersama. Menurut Ibnu Sinar, pengelolaan lahan program TORA lebih baik dikelola oleh BUMKam masing-masing desa, tidak perlu membentuk BUMKam bersama, karena tidak semua kepala desa atau masyarakatnya berpikir hal itu untuk keuntungan bersama.

Kelembagaan masyarakat yang juga dapat dijadikan lembaga pengelola lahan Program TORA adalah Koperasi. Secara umum pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya, membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar, dan membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia.

Asisten 1 Bupati Siak, Drs. Budhi Yuwono, M.Si saat diwawancara di Kantor Bupati Siak (Januari, 2020) mengatakan bahwa dalam pengelolaan lahan TORA ini, Pemda mencari Pihak ketiga yang ahli di bidangnya sesuai dengan tanaman yang ingin ditanam oleh masyarakat. Setelah itu Pihak ketiga bekerja sama dengan Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat penerima TORA dalam pengelolaan lahan TORA mereka. Pemkab berharap adanya pihak ketiga yang memang memiliki modal kuat, sehingga bisa melakukan penanaman di lahan TORA ini. Selain itu Koperasi bisa juga bekerja sama dengan Bank dengan jaminan sertifikat. Sama halnya dengan Asisten 1 Bupati Siak, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Muhammad Ihsan, SP saat diwawancara di ruang kerjanya (Januari, 2020) mengatakan bahwa untuk mengelola lahan eks HGU tersebut terlebih dahulu dibentuk Kelompok Tani. Setelah dibentuk kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan, kemudian dibentuklah satu Koperasi sebagai lembaga usaha dari semua lembaga masyarakat tersebut.

Selain itu, kelembagaan masyarakat yang dapat dijadikan lembaga pengelola lahan program TORA adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan, disebutkan bahwa Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan bagi anggotanya.

Strategi Pengelolaan Lahan Gambut Eks HGU Berbasis Masyarakat di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, serta kebijakan pengelolaan ekosistem gambut. Dengan demikian, rencana strategis pengelolaan harus menganalisis faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman berdasarkan hasil wawancara dan kondisi lahan gambut saat tinjauan lapangan. Matrik IFAS dan EFAS dapat dilihat pada Tabel. 3 dan Tabel 4.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3, diperoleh nilai total IFAS sebesar 2,64 yang terdiri dari skor kekuatan sebesar 1,56 dan skor kelemahan sebesar 1,08 dengan skor kekuatan tertinggi 0,2 yaitu (1) Distribusi tanah asset negara dengan status SHM, (2) Pemkab Siak merencanakan pengelolaan lahan secara bersama, (3) Pemkab Siak mencoba membuat suatu sistem tata kelola bersama dalam pengelolaan lahan program TORA. Skor kelemahan 1,08 dengan skor faktor kelemahan terendah 0,08 yaitu (1) Kurangnya pengetahuan petani akan komoditi yang sesuai dan memiliki nilai ekonomi di lahan gambut, (2) Tidak semua petani memiliki modal, (3) Lahan eks HGU didominasi oleh gambut sangat dalam dengan rata-rata kedalaman 2 hingga 8 meter.

Tabel 3. Matrik IFAS

No	Faktor Strategi Internal	Bobot	Ratin g	Sko r
Kekuatan/Strengths (S)				
1.	Distribusi tanah asset negara dengan status SHM	0,05	4	0,2
2.	Pemkab Siak merencanakan pengelolaan lahan secara bersama	0,05	4	0,2
3.	Pemkab Siak mencoba untuk membuat suatu sistem tata kelola bersama dalam pengelolaan lahan program TORA.	0,05	4	0,2
4.	Tanaman yang bisa dikembangkan adalah tanaman yang ramah gambut.	0,02	2	0,04
5.	Kondisi infrastruktur akses cukup baik dan mudah diakses.	0,03	3	0,09
6.	95% masyarakat berprofesi sebagai petani	0,04	4	0,16
7.	Padi merupakan makanan pokok yang cukup populer dan digemari masyarakat.	0,02	2	0,04
8.	Usaha tani padi didukung oleh kebijakan nasional	0,03	2	0,06
9.	BUMKam dapat menjadi induk kegiatan kelembagaan ekonomi di Kampung termasuk Koperasi.	0,04	2	0,08
10.	Koperasi Unit Kampung berada di hampir semua kampung di areal TORA	0,03	2	0,06
11.	Adanya Pelabuhan Tanjung Buton sebagai pelabuhan bongkar muat, ekspor dan impor	0,03	1	0,03
12.	Persepsi masyarakat pada lahan TORA cukup baik	0,04	3	0,12
13.	Masyarakat mengetahui tentang bahaya kerusakan gambut	0,03	4	0,12
14.	Pemkab Siak memberi pendampingan bagaimana mengolah lahan pada petani	0,04	4	0,16
Sub Total		0,5		1,56
Kelemahan/Weakness (W)				
1.	Ketergantungan pendapatan masyarakat dari Kelapa sawit.	0,07	4	0,28
2.	Kurangnya pengetahuan petani akan komoditi yang sesuai dan memiliki nilai ekonomi di lahan gambut	0,08	1	0,08
3.	Ekspor pinang masih terbatas dilakukan dalam bentuk buah yang telah dikeringkan, dalam keadaan utuh (bulat) atau dibelah	0,06	4	0,24
4.	Tidak semua petani memiliki modal	0,08	1	0,08
5.	Lahan eks HGU didominasi oleh gambut sangat dalam dengan rata-rata kedalaman 2 hingga 8 meter.	0,08	1	0,08
6.	Ada kanal	0,07	2	0,14
7.	Penjualan komoditas melalui tengkulak atau pengepul	0,06	3	0,18
Sub Total		0,5		1,08
Total				2,64

Tabel 4. Matrik EFAS

No	Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang/Opportunity (O)				
1.	Masyarakat dapat mengembangkan jenis tanaman yang potensial	0,04	4	0,16
2.	BUMKam dapat dijadikan lembaga pengelola TORA	0,04	4	0,16
3.	Pemerintah Kampung dapat melakukan penyertaan modal ke BUMKam	0,04	4	0,16
4.	Koperasi dapat dijadikan lembaga pengelola	0,03	3	0,09
5.	Koperasi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga	0,03	4	0,12
6.	Potensi produksi padi sangat besar	0,02	1	0,02
7.	PT. RAPP dan PT. IKPP membutuhkan ubi kayu sebagai perekat <i>pulp</i>	0,02	2	0,04
8.	Kelapa hibrida mampu beradaptasi dengan baik di lahan gambut.	0,02	1	0,02
9.	Pengolahan produk kelapa sangat beragam	0,03	1	0,03
10.	Sagu dapat dimanfaatkan untuk pangan, non pangan dan lain-lain.	0,02	1	0,02
11.	Preferensi konsumen dan pedagang di Siak dan Pekanbaru atas kopi tinggi	0,02	1	0,02
12.	Pohon aren memiliki potensi ekonomi yang tinggi	0,03	4	0,12
13.	Budidaya aren menyerap banyak tenaga kerja.	0,04	4	0,16
14.	Kayu Mahang memiliki peluang pasar yang sangat baik.	0,04	4	0,16
15.	Jalur pemasaran Nanas tersedia	0,04	4	0,16
16.	Ada pabrik Tepung Tapioka di Kecamatan Kandis	0,04	2	0,08
Sub Total		0,5		1,52
Ancaman/Threat (T)				
1.	Pendistribusian tanah dilakukan dengan cara diundi	0,08	1	0,08
2.	Masyarakat berharap dapat menanam tanaman yang dapat meningkatkan ekonomi secara cepat	0,06	2	0,12
3.	Masyarakat ingin mengelola lahan menjadi lahan pertanian dan perkebunan.	0,06	2	0,12
4.	Perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan merupakan konsekuensi kesulitan dalam mencari potensi pasar yang beragam.	0,04	4	0,16
5.	Status lahan SHM dapat dijual oleh masyarakat	0,07	1	0,07
6.	Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar	0,07	1	0,07
7.	Topografi datar dapat mengakibatkan banjir	0,06	3	0,18
8.	Sumber air pada lahan eks HGU-9 hanya berasal dari air hujan	0,06	2	0,12
Sub Total		0,5		0,92
Total		1		2,44

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4, diperoleh nilai total EFAS sebesar 2,44 yang terdiri dari skor peluang sebesar 1,52 dengan skor peluang tertinggi 0,16 yaitu (1) Masyarakat dapat mengembangkan jenis tanaman yang potensial, (2) BUMKam dapat dijadikan lembaga pengelola TORA, (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan penyertaan modal ke BUMKam,

(4) Budidaya aren menyerap banyak tenaga kerja, (5) Kayu Mahang memiliki peluang pasar yang sangat baik, dan (6) Jalur pemasaran Nanas tersedia. Skor ancaman 0,92 dengan skor faktor ancaman terendah 0,07 yaitu (1) Status lahan SHM dapat dijual oleh masyarakat, dan (2) Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Memperhatikan peluang dan ancaman yang ada, maka pengelolaan lahan gambut eks HGU berbasis masyarakat masih menduduki posisi yang cukup strategis untuk terus dikembangkan karena skor peluang lebih dominan daripada skor ancaman.

Setelah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam pengelolaan lahan gambut eks HGU di Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, kemudian dilakukan analisis menggunakan matriks SWOT seperti pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Matriks Analisis SWOT (Rangkuti, 2013).

IFAS EFAS	Strengths (S) Faktor-faktor kekuatan internal	Weaknesses (W) Faktor-faktor kelemahan internal
Opportunities (O) Faktor-faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T) Faktor-faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Dengan menggunakan analisis matriks SWOT pada Tabel 5, diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO

- a. Pengelolaan lahan masyarakat yang umumnya petani dengan menanam tanaman ramah gambut dan memiliki potensi melalui BUMKam.
- b. Pengelolaan lahan secara bersama dan menyeluruh oleh Pemkab Siak dan masyarakat menggunakan sistem tata kelola bersama dengan menanam tanaman yang potensial seperti Padi, Nanas, Ubi kayu, Kelapa, Sagu, Aren, dan Mahang.

2. Strategi ST

- a. Memberi pengetahuan, pemahaman, dan pendampingan oleh Pemkab Siak dalam upaya mengurangi Karhutla akibat pembukaan lahan.
- b. Melakukan penyusunan Sistem tata kelola bersama yang berbasis masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan lahan TORA.
- c. Membentuk suatu unit di bawah naungan BUMKam dengan badan usaha berbentuk Koperasi untuk pengelolaan lahan program TORA masyarakat dengan komoditas yang disepakati oleh masyarakat dan dengan jaminan sertifikat tanah masyarakat.

3. Strategi WO

- a. Pengelolaan lahan masyarakat oleh BUMKam menggunakan dana desa melalui mekanisme penyertaan modal oleh Pemerintah Kampung atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- b. Lahan gambut dalam dikelola dengan menanam Mahang.
- c. Memberi pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang komoditi yang sesuai dan memiliki nilai ekonomi di lahan gambut seperti tanaman Pertanian (Padi, Jagung, Nanas, dan Ubi kayu), tanaman Perkebunan (Kelapa, Pinang, Sagu, Kopi Liberika, dan Aren),

dan tanaman Kayu-kayuan (Mahang) untuk mengatasi ketergantungan pendapatan masyarakat dari Kelapa sawit.

4. Strategi WT

Membuat tata kelola tinggi muka air untuk mencegah kekeringan atau kebakaran saat musim kemarau dan tergenang atau banjir saat musim hujan.

KESIMPULAN

Pada umumnya masyarakat menerima program TORA oleh Pemkab Siak, namun lokasi persil hasil distribusi tanah dengan kondisi acak menyebabkan kesulitan mengelola lahan TORA secara individu. Sehingga masyarakat berharap pengelolaannya dapat dilakukan secara bersama dan dibantu oleh pemerintah. Kondisi lahan gambut eks HGU Korporasi di Kampung Sungai Berbari dan Kampung Sungai Limau mempunyai potensi dikembangkan untuk areal budidaya. Strategi pengelolaan lahan gambut eks HGU berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Pendampingan oleh Pemkab Siak dalam upaya mengurangi karhutla akibat pembukaan lahan, (b) Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertanian yang memiliki nilai ekonomi pada tanaman Pertanian, tanaman Perkebunan, dan tanaman Kayu-kayuan, (c) Pengelolaan lahan menggunakan dana desa melalui mekanisme penyertaan modal oleh Pemerintah Kampung ke BUMKam atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi Pemkab Siak, (d) Membentuk suatu unit di bawah naungan BUMKam dengan badan usaha berbentuk Koperasi dengan komoditas yang disepakati oleh masyarakat dan dengan jaminan sertifikat tanah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H. and Page, S. 2006. *PEAT-CO₂, Assessment of CO₂ emissions from drained peatlands in SE Asia*. Delft Hydraulics report Q3943.
- Hooijer, A., S. Page, J.G. Canadell, M. Silvius, J. Kwadijk, H. Wösten, and J. Jauhiainen. 2010. *Current and future CO₂ emission from drained peat lands in Southeast Asia*. Biogeosciences.
- Miettinen, J., Shi, C. & Liew, S.C. 2016. *Land cover distribution in the peatlands of Peninsular Malaysia, Sumatra and Borneo in 2015 with changes since 1990*. Global Ecology and Conservation.
- Najiyati, S., Lili Muslihat. dan I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Panduan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan*. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.